PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A.,Ph.D

Disampaikan dalam kuliah tamu kelas Mahasiswa S2 dan S3 FEB Universitas Airlangga
Surabaya, 22 Nov 2018

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal yang penting bagi pemerintahan

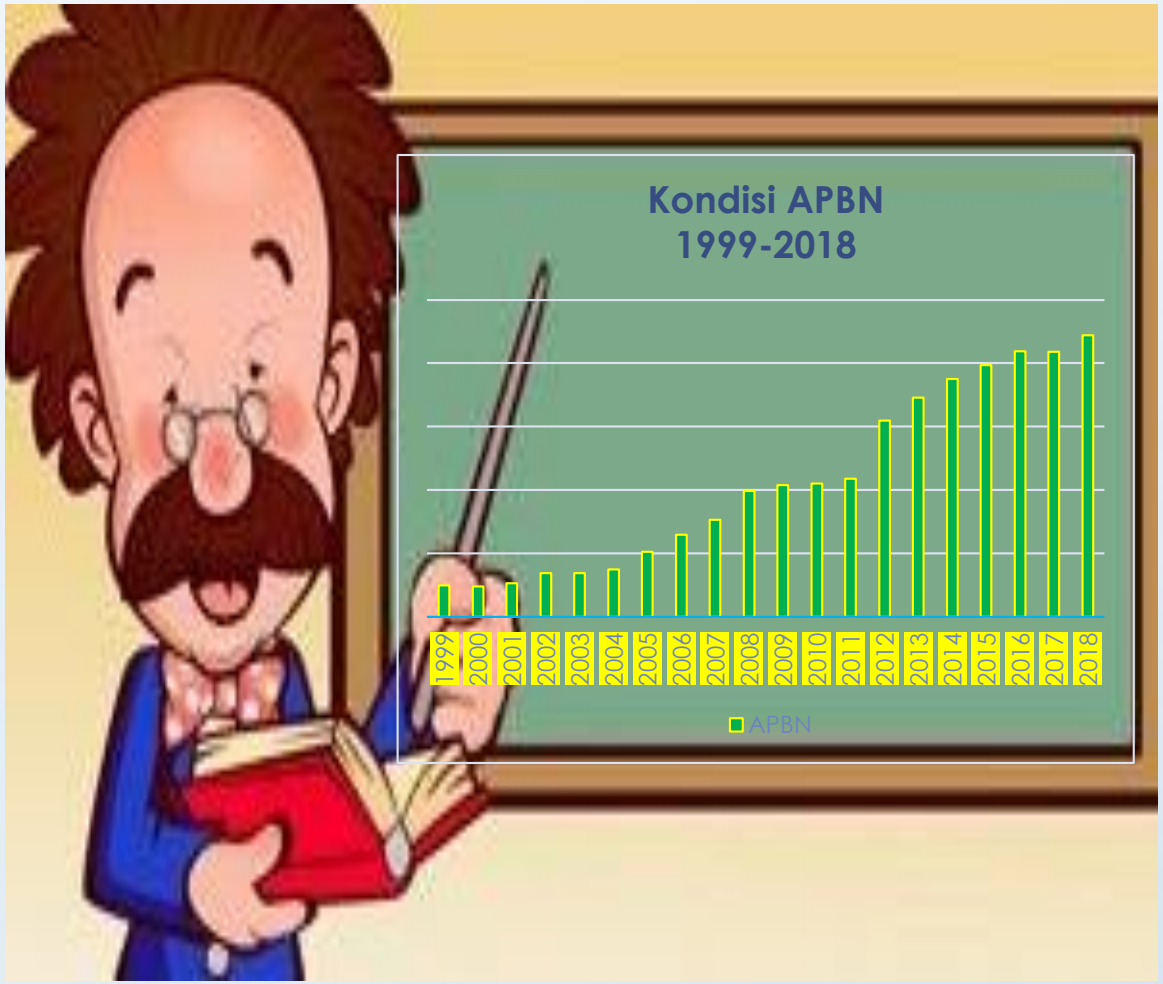

Konsekuensi

Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dikelola dan dikawal dengan baik

Informasi tentang APBN penting diketahui mahasiswa. Mereka nantinya akan berkontribusi ikut memerdekakan masyarakat. Merdeka dari kemiskinan, dari kelaparan, dan dari buta huruf.

"On what basis shall it be
decided to allocate X dollars to Activity A instead of
Activity B?"

V. 0. Key, Jr.,
"The Lack of Budgetary Theory," 1940

Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

visi, misi dan program calon presiden dan calon kepala daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional/Daerah (RPJMN/D)

Diajukan ke DPR

dilaksanakan oleh Presiden/Kepala Daerah selama satu tahun fiskal

The crucial aspect of budgeting is whose preferences are to prevail in disputes about which activities are to be carried on and to what degree, in lightof limited resources ... who shall receive budgetary benefits and how much?

Aaron Wildavsky
"Political Implications of Budgetary Reform," 1961

piagam politik anggaran pemerintah terpilih

SIKLUS APBN

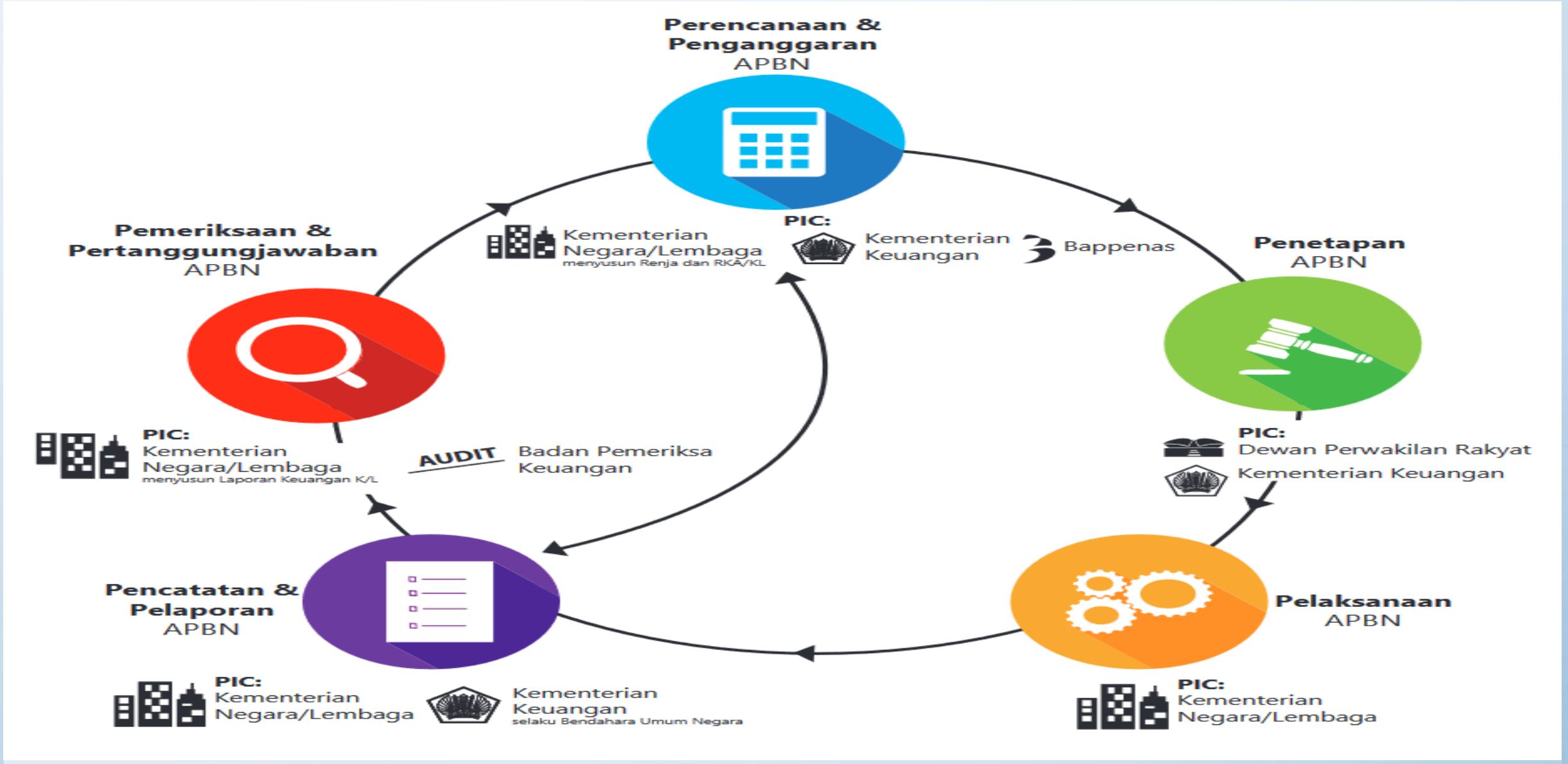

Sumber : Kemenkeu, Proses Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran, 2016.

Proses Bisnis Penyusunan APBN

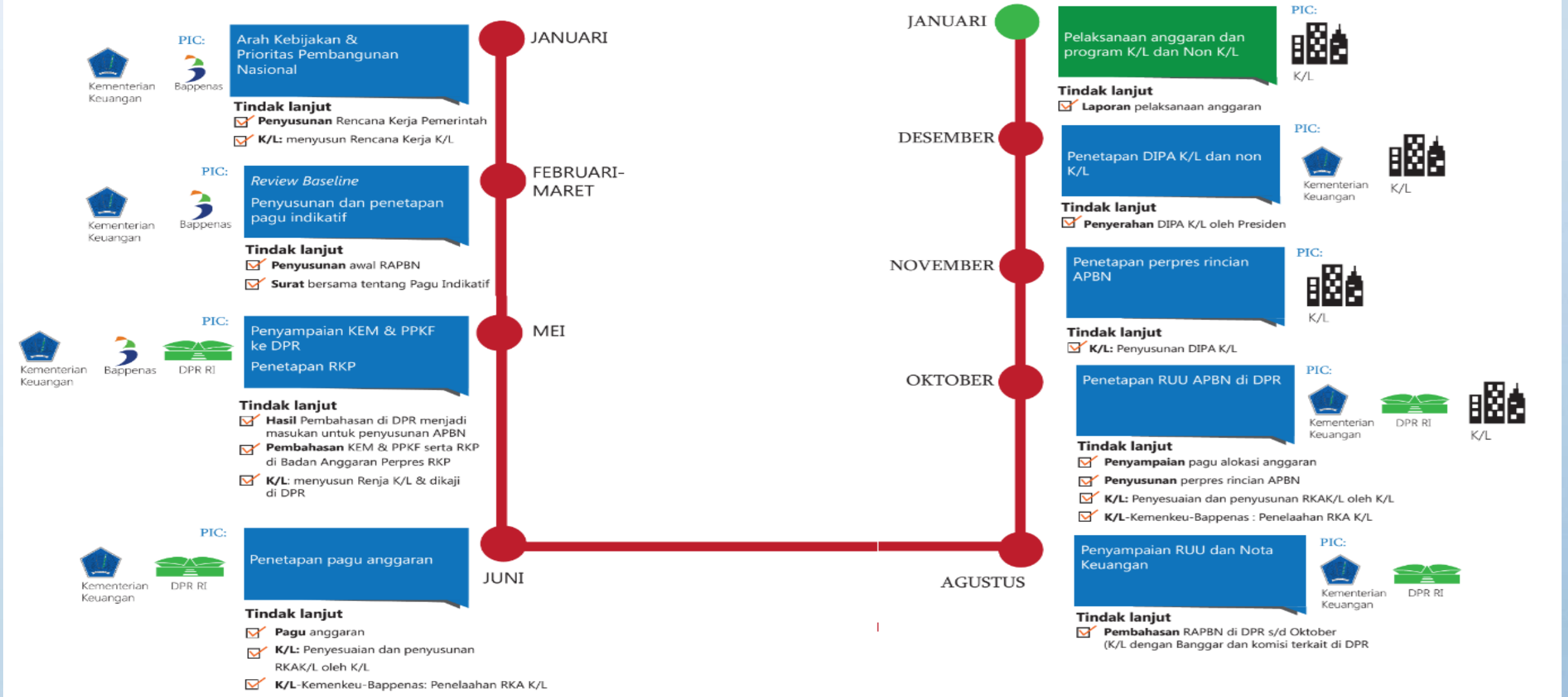

Sumber : Kemenkeu, Proses Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran, 2016.

Pengelolaan
APBN

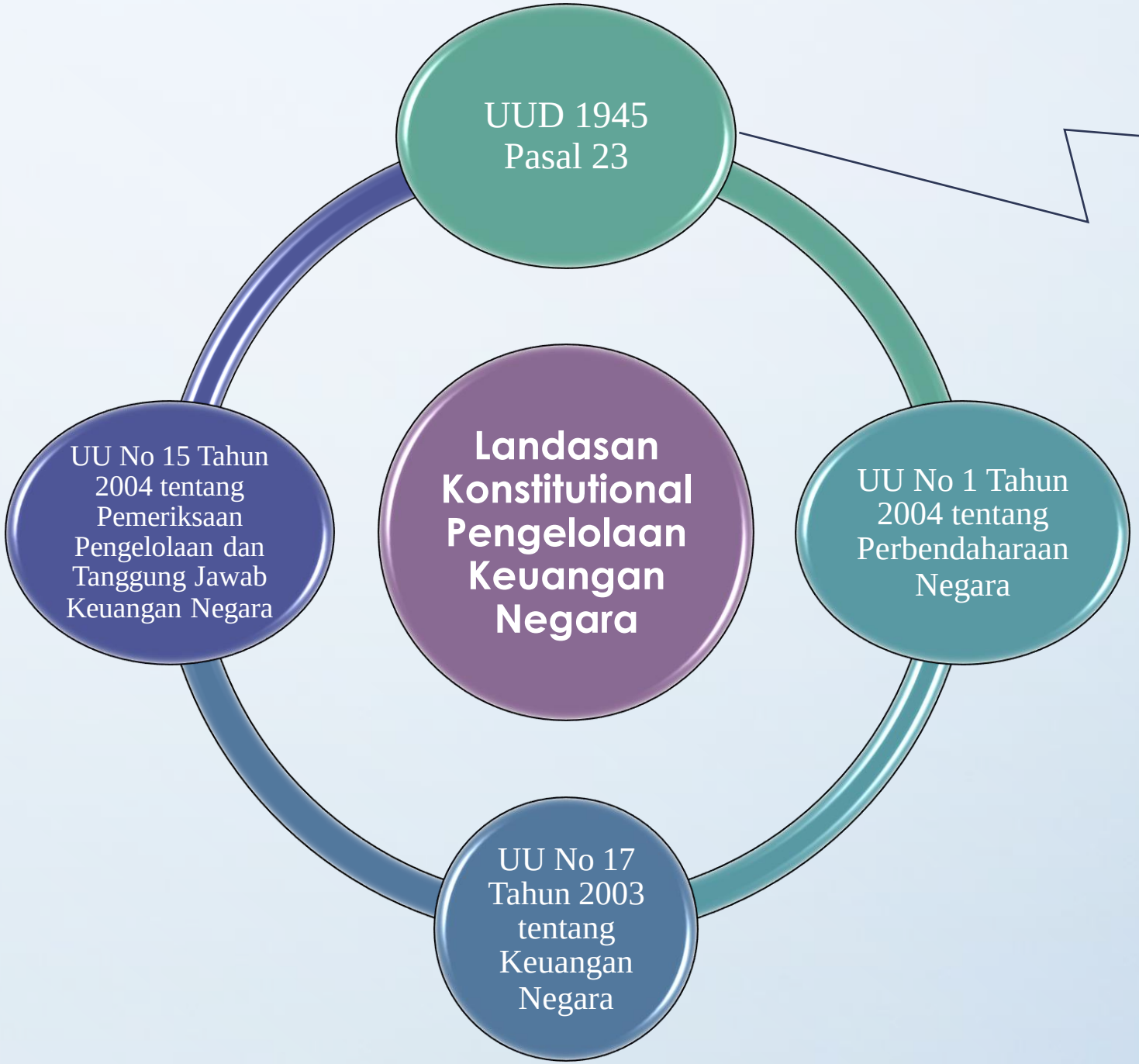

"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

PRINSIP DASAR KEUANGAN NEGARA
Transparansi
Bertanggung Jawab
Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat

FUNGSI APBN

Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi : "APBN/APBD mempunyai **fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi**".

Fungsi Otorisasi

dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun bersangkutan.

Fungsi Perencanaan

Pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi Pengawasan

Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Alokasi

Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi Distribusi

Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi Stabilisasi

Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Sumber : Kementrian Keuangan , 2014, Pokok-pokok siklus APBN di Indonesia, Jakarta, hlm 1.

Konsep Penyusunan APBN

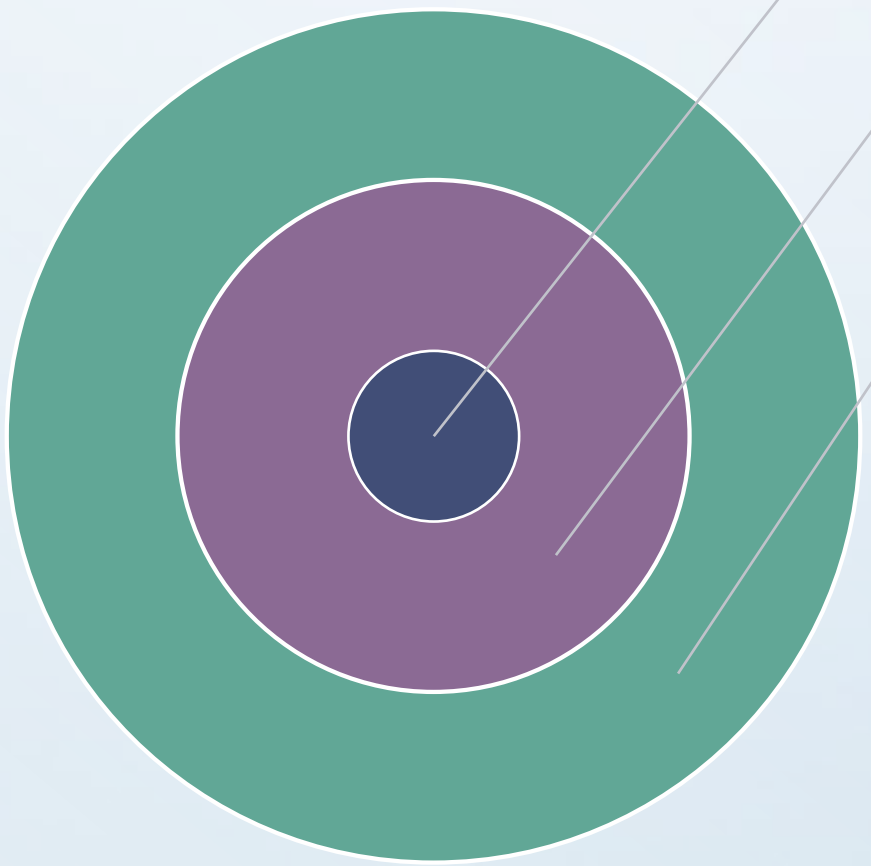

Fungsi APBN

Fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Politik Anggaran

Wildavsky (2004:iv), semua **anggaran** pemerintahan **adalah** tentang **politik,** keputusan tentang kekuasaan, siapa yang memegangnya, siapa yang diuntungkannya, dan siapa yang tidak diuntungkan. pemerintah memutuskan berapa banyak uang yang diberikan ke setiap program dengan melihat berapa banyak uang yang diterimanya dan memberikan sebuah manfaat **"keadilan".**

Kesejahteraan Rakyat

Takaran **"keadilan"** yang disebut Wildavsky?

1. Tidak sekadar besarnya alokasi.
2. Anggaran harus *pro poor, pro growth* dan *pro job*.
3. Anggaran yang dialokasikan dapat memperbaiki indikator-indikator kesejahteraan

Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan Keuangan

- "... untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, atas kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada peraturan perudang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian internal."

Pemeriksaan Kinerja

- "... untuk menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas, dan kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong kearah perbaikan."

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

- "… menguji kesesuaian (patuh) terhadap ketentuan perundang-undangan."

Pemeriksaan Kinerja dan Politik Anggaran

Apakah kenaikan alokasi belanja telah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

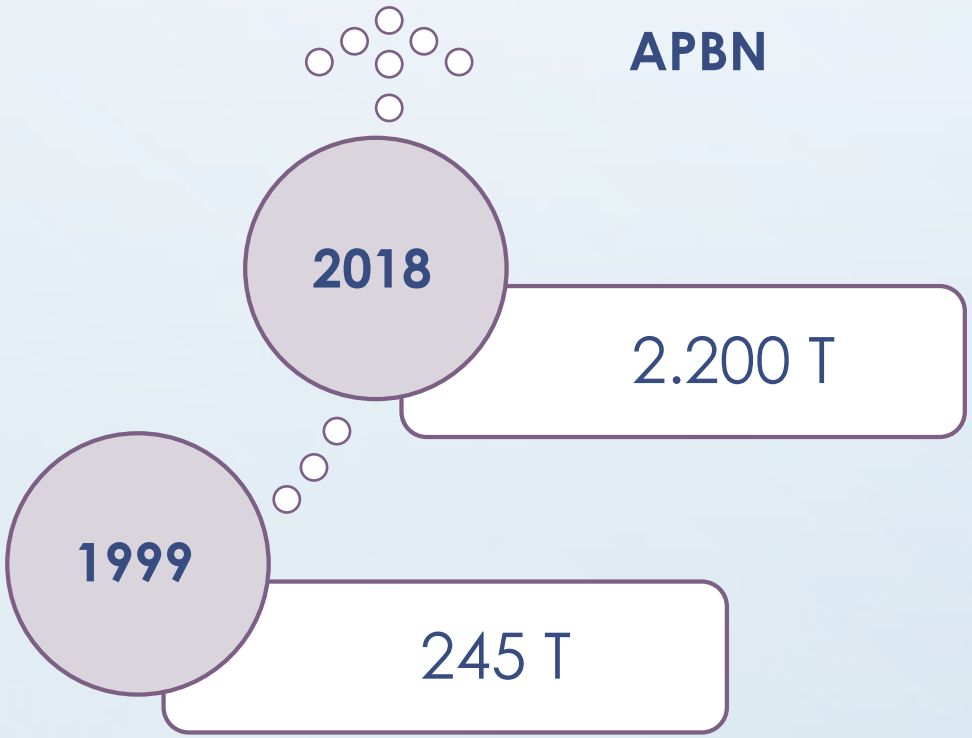

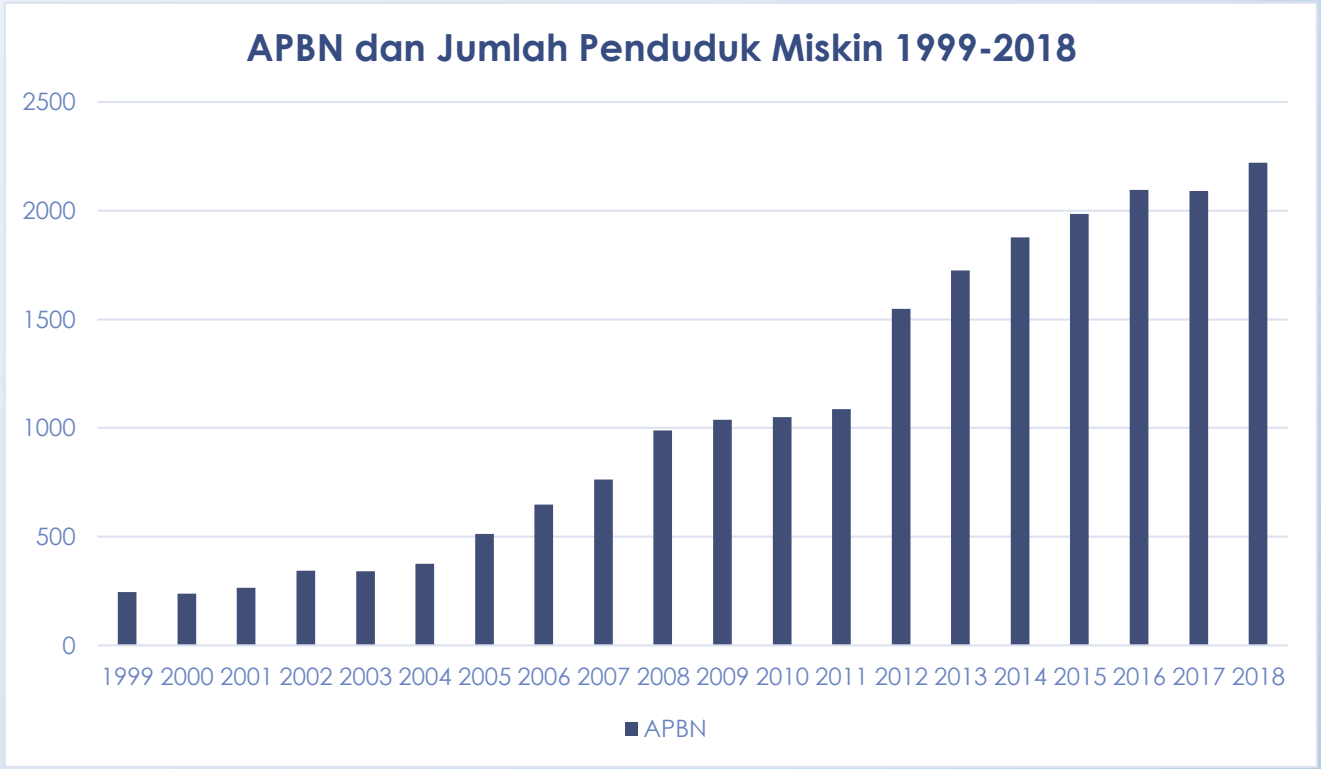

Kenaikan APBN telah membantu pencapaian indikator kesejahteran…. Tapi belum maksimal

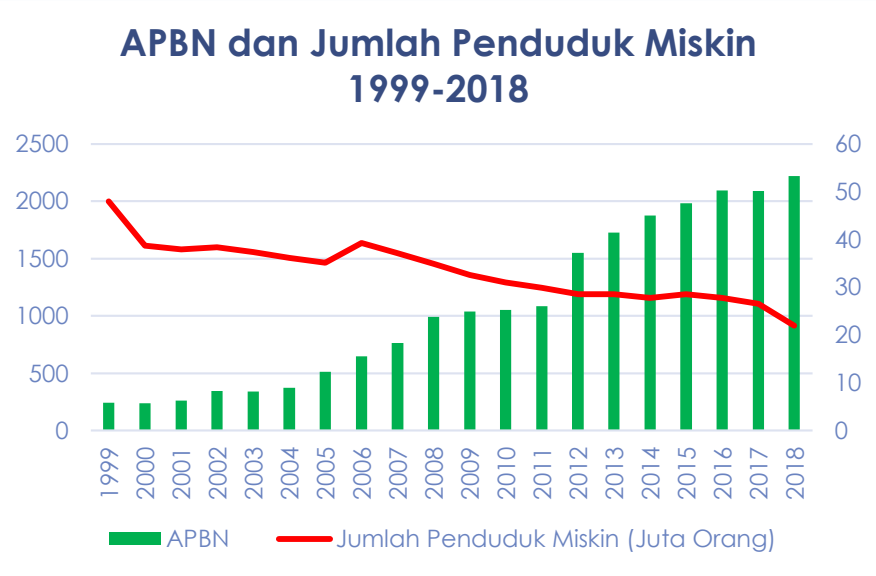

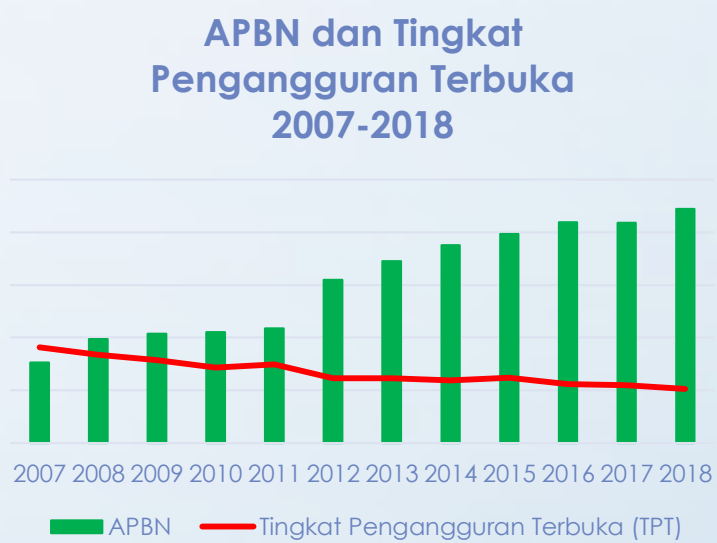

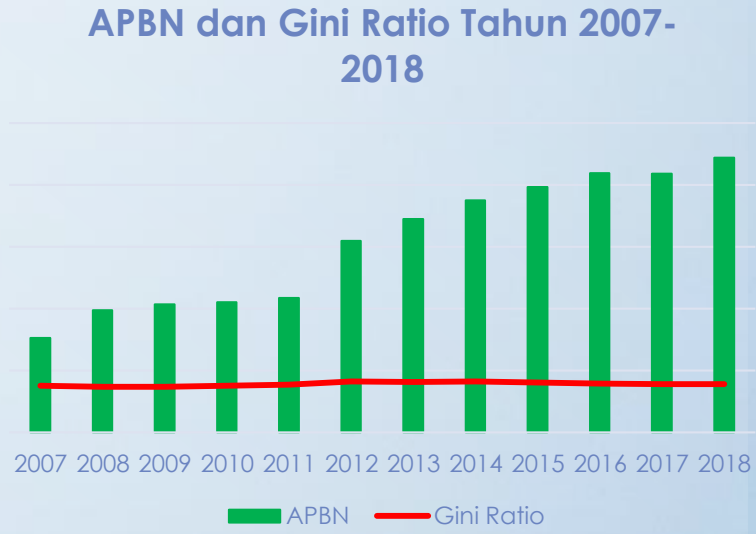

Tahun 2018 disebut sebagai angka kemiskinan terendah (9,82%) atau 25,95 juta orang miskin turun dari tahun 2017 yaitu 26,58 juta (10,12%). Angka kemiskinan lebih buruk di desa. Di kota jumlah penduduk miskin 10,14 juta (7,02%) sedangkan di desa masih tinggi 15,81 juta orang (13,20%). Pembangunan terasa lebih menguntungkan penduduk kota dibanding desa.

Angka pengangguran terbuka di tahun 2018 turun menjadi 5,13% atau sebesar 6,87 juta jiwa, dari sebelumnya di tahun 2017 sebesar 5,33% atau 7,01 juta. Meski turun, jumlah penganggur terbanyak justru mereka yg berpendidikan SLTA (1.650.636)

Tahun 2018, Rasio Gini membaik 0,389 tetapi ketimpangan di pedesaan justru meningkat dari 0,320 tahun 2017 menjadi 0,324 tahun 2018.

Sumber : diolah penulis dari Nota Keuangan APBN 1999-2016, data APBN Kemenkeu dan BPS, 2018.

Pemeriksaan kinerja yang komprehensif, yang didukung pemeriksaan tematik, harusnya dapat menemukan masalahnya. Misalnya, apakah ada alokasi anggaran yang tidak efektif atau ada inefisiensi pengelolaan anggaran. Rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja keuangan negara digunakan untuk memperbaikinya. Tanggungjawab keuangan negara bukan hanya kesesuaian dengan prinsip kepatuhan dan kewajaran (*accountability*) tetapi lebih utama adalah dengan prinsip pencapaian sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (*responsibility*). Diyakini, pemeriksaan keuangan negara, khususnya pemeriksaan kinerja, dapat memperbaiki pola pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan.

Tantangan Pengelolaan APBN

BELANJA : KOMITMEN

- Memprioritaskan belanja produktif dan pro growth
- Mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia
- Mengurangi inefisiensi dan korupsi

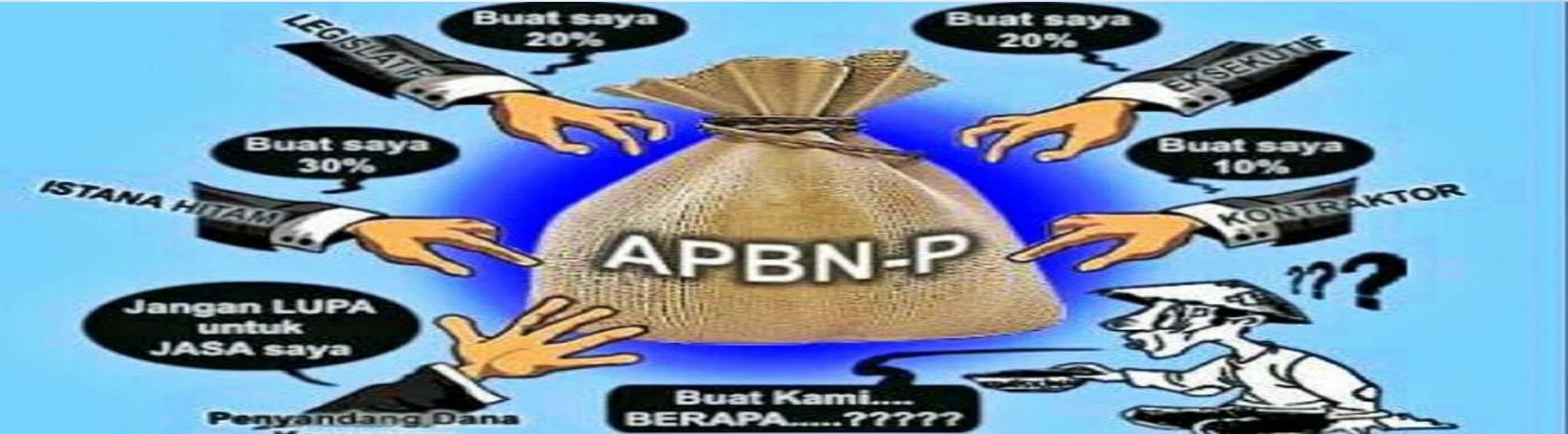

Thank you!